



### **Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Pengembangan Pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2011**

**Tengku Mahesa Khalid, S.I.P, M.M**

*Institut Agama Islam Taffaquh Fiddin Dumai*

[Mahesakhalid@yahoo.com](mailto:Mahesakhalid@yahoo.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran dalam pengembangan pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kota Dumai Tahun 2011. Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan anggaran berpengaruh positif dalam pengembangan pariwisata, terlihat dengan anggaran yang ada namun beberapa objek wisata yang ada tidak terlihat perbaikan dan perawatannya seperti sarana prasarana di lokasi objek wisata.

**Kata Kunci : Pengelolaan Pariwisata, Objek wisata Dumai, Dinas Pariwisata**

#### **ABSTRACT**

This research aimed to investigate the budgeting management of tourism development in culture, ,tourism,youth and sport office Dumai in 2011.The analysis technic of this research is qualitative descriptive. The result of this research found that the budgeting management positively influence in tourism development, can be seen with the budgeting itself. However, several of tourism object shows there is no repairing and maintaining for example the tool and infrastructure at the tourism location.

**Keywords: tourism development, Dumai tourism object, tourism office.**



### Pendahuluan

Reformasi politik yang dilancarkan pada tahun 1998 telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang sentralistik digantikan dengan pemerintahan yang desentralistik. Kebebasan demokrasi dalam arti yang sebenarnya dikungkung dan dipasung sekian lama mulai dihidupkan kembali. Demokrasi dan debirokratisasi mendorong semangat pembangunan terasa lebih bergairah di berbagai daerah. Pemerintah yang desentralistik menerapkan azas demokrasi diikuti oleh pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Otonomi daerah di implementasikan sejak 1 Januari 2001, memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan di setiap daerah. Daerah-daerah otonom (kabupaten/kota) diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adisasmita, 2010).

Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan yang lainnya. Untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar kegiatan peneglolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasaldari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri dairtikan sebagai semangat dan tekad yang kuiat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menguntungkan pada fasilaitas atau faktor yuang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian terbesar daerah otonom, kemampuan PAD nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dario pemerintah pusat. Meskipun tingkat keterhgantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengolahan sumberdaya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2004. Meningkatkan penerimaan daerah tersebut akan meningkatkan APBD (Adisasmita, 2010).

Dalam hal ini, masing-masing daerah memiliki kebijakan tertentu yang sesuai atau diselaraskan dengan visi-misi kepala Daerah yang memimpin daerah itu sendiri. Kota Dumai sebagai pintu gerbang Provinsi Riau yang terletak di pesisir tepi pantai timur sumatera memiliki potensi pengembangan pariwisata yang memiliki pelabuhan yang berpotensi untuk dikunjungi



# JURNAL AL-HISBAH

## Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau  
Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

---

oleh para wisatawan asing serta juga bisa dijadikan sebagai portal untuk menuju negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Potensi lain juga seperti wisata alam, budaya dan belanja. Beberapa daerah yang memiliki potensi wisata di antaranya kawasan hutan senepis di Kecamatan Sungai Sembilan, hutan wisata di Kecamatan Dumai Barat dan Danau Bunga Tujuh di Dumai Timur, kawasan pantai Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dan Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur, Dumai Kota dan Konservasi Bandar Bakau di Dumai Selatan. Sebagai gerbang utama untuk memasuki Riau Daratan, beberapa turis sudah berulang kali mengunjungi Dumai, terutama yang ingin mengunjungi Malaka (malaysia). Dumai sangat mudah dicapai karena transportasinya yang lancar. Ada beberapa objek wisata yang menarik dalam perjalanan menuju Dumai, seperti adanya suku terbelakang yang dinamakan suku Sakai, hutan tropis di sepanjang jalan, dan air sungai yang warnanya unik seperti warna teh. Selain itu juga dapat dilihat beratus pipa angguk yang mengangkat minyak dari perut bumi. Untuk itu dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kota dumai punya peluang yang memungkinkan untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan untuk mengelola potensi budaya dan pariwisata baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sektor pariwisata telah menjadi penggerak utama kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Besarnya potensi sektor pariwisata, pemerintah telah menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membangun industry pariwisata melalui pembenahan infrastruktur, promosi dan peningkatan pelayanan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan keamanan.

Menurut Crouch (2007) dalam artikelnya menjelaskan bahwa untuk mengembangkan dan membenahi sektor pariwisata ada sepuluh faktor yang paling mempengaruhi daya saing pariwisata : Fisiografi dan iklim, Budaya dan Sejarah, Superstruktur pariwisata, Bauran Kegiatan, Kepedulian/Citra, Kegiatan-kegiatan Khusus, Hiburan, Infrastruktur, Akses dan Penentuan Posisi / Merek. Secara umum, sepuluh faktor tersebut dapat diklasifikasikan sumber daya utama dan daya tarik (Fisiografi dan iklim, Budaya dan Sejarah, Superstruktur pariwisata, Bauran Kegiatan, dan Hiburan); kebijakan destinasi, perencanaan dan pembangunan (Penentuan Posisi / Merek); kualifikasi dan penguatan faktor penentu (Kepedulian/Citra); dan faktor pendukung dan sumber daya lain (Infrastruktur dan Akses).

Dalam pengembangan pariwisata, kota dumai memiliki budaya sejak trurun temurun menjadi kebiasaan masyarakat dumai yang dikemas dalam bentuk kegiatan seperti Festival Lampu Colok pada tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Dinas kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga. Acara ini bertujuan memperkuat kebudayaan melayu yang sudah lama ada di Dumai terus melekat pada masyarakat dumai dan juga dapat menarik perhatian wisatawan asing untuk berkunjung ke kota dumai.



Menurut Basuki (2007) Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap jurusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa (Basuki, 2007)

1. kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.
2. kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah.
3. hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
4. hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan.

Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara serta merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan yang terkait dimaksud antara lain UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dan UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ide dasar yang melatarbelakangi ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara terintegrasi, efektif dan efisien. Ide tersebut tentu ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintah yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar mempermudah dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud adalah PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang memuat kebijakan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Adisasmita, 2010).

Dari sudut pandang ekonomi objek-objek wisata yang sudah ada di Kota Dumai sangat menunjang sebagai sarana yang semestinya memang harus dikelola oleh pemerintah Melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. bahkan masih banyak lokasi lokasi yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata lebih



lanjut. Potensi yang dikelola tersebut akan menjadi sumber-sumber penerimaan yaitu PAD yang terdiri dari :

- (1) Hasil Pajak Daerah
- (2) Hasil Retribusi Daerah
- (3) Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- (4) PAD lain-lain yang sah

### Kajian Teori

Pengelolaan merupakan Istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “Kelola” dan biasa merujuk pada proses mengurus menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu (Adisasmita, 2010).

Menurut Terry (2009) pengelolaan (*management*) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprpto (2009), juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Menurut Mardiasmo (2007:61), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *Financial*.

Menurut Bastian (2010:191) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Menurut Mardiasmo (2009:66) anggaran dibagi menjadi dua yaitu :



### 1. Anggaran Operasional (*Current Budget*)

Anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah, seperti belanja rutin yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah *asset* atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum Belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan masuk kategori anggaran operasional.

### 2. Anggaran modal (*Capital Budget*)

Anggaran modal menunjukkan rancana jangka panjang pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya milik public.

Penganggaran menurut Mardiasmo (2009:61) adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sector public, penganggaran merupakan suatu proses politik dan harus diinformasikan kepada public untuk di kritik didiskusikan dan diberi masukan.

Menurut Kodyat (2001) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Bram (2006) menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Sedangkan Wahab (2003) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri. Hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam Peraturan Daerah (PERDA)

### **Pengelolaan Anggaran Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2011 berdasarkan urusan SKPD di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Melihat dari jumlah alokasi dan di tiap bidang Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, besaran anggaran untuk bidang pariwisata lebih kecil dari Bidang Pemuda dan



Olahraga. Dimana bidang bidang pariwisata hanya mendapat 22 % alokasi anggaran berbeda dengan bidang pemuda dan olahraga yang persentasi alokasi anggaran mencapai 25 %.

Tahun Anggaran	Urusan	Jumlah (Rp)
2010	Kebudayaan	472.331.000
	Pemuda dan olahraga	303.925.000
	Pariwisata	550.472.000
	Sekretariat	1.066.953.405
<b>TOTAL</b>		<b>2.078.696.164</b>

*Sumber : Disbudparpora Dumai*

Pengembangan alokasi anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Periode 2010-2011.

No	Urusan	Jumlah(Rp)	Persentase
1.	Kebudayaan	756.329.000	22 %
2	Pariwisata	775.103.850	22 %
3	Pemuda dan Olahraga	865.165.250	25 %
4	Sekretariat	1.006.953.405	31%
<b>Total</b>		<b>3.463.551.505</b>	100 %

*Sumber : Disbudparpora Dumai*

Dari tabel diatas perkembangan alokasi anggaran tahun 2010 untuk bidang pariwisata mengalami peningkatan, namun anggaran tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari perkembangan pariwisata anggaran tersebut juga tidak mencukupi pengembangan potensi pariwisata unggulan.

Pengembangan pariwisata sangat penting terutama bagi negara berkembang karena industri pariwisata adalah industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri yang meningkatkan nilai suatu wilayah geografis, dan mendorong revitalisasi wilayah geografis yang sudah kehilangan daya tariknya (Ryan, 1991). Pengembangan pariwisata juga merupakan industri dengan *low cost*. Industri pariwisata tidak memerlukan investasi terlalu besar dalam jangka panjang sebelum memberikan keuntungan.



Salah satu modal utama dalam pengembangan pariwisata sudah tersedia seperti daya tarik wisata (sumber daya alam, kebudayaan). Keuntungan yang lain yaitu pengembangan pariwisata merupakan jalan bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan karena pariwisata memiliki karakteristik : memberikan peluang bagi penduduk lokal memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan dari konsumen yang datang, membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal, membuka peluang bagi usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah, dan tidak hanya bergantung pada modal akan tetapi akan tetapi tergantung pada modal budaya dan alam yang merupakan aset yang dimiliki golongan bawah (Tjokrowinoto,2005).

Disamping itu pembangunan kebudayaan pun tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pariwisata, karena bersama pariwisata, prestasi di bidang kebudayaan akan dapat lebih menciptakan nilai tambah baik bagi daerah

### **Kesimpulan**

1. Pengelolaan anggaran berpengaruh positif pada pengembangan pariwisata. Terlihat dalam alokasi anggaran yang tidak focus pada sector pariwisata saja, anggaran juga di alokasikan untuk sector kebudayaan dan sector pemuda dan olahraga. Dengan mangacu pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tetap saja sulit mengembangkan pariwisata yang ada dengan anggaran yang kecil. Namun dengan memfokuskan pada salah sector yaitu pariwisata pemerintah seharusnya bisa lebih maksimal
2. Pemerintah Daerah harus bisa menentukan dan menetapkan prioritas anggaran agar sumber daya yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan kewajiban pemerintah.
3. Masih terlihat di lapangan objek-objek wisata unggulan tidak terkelola dengan baik, mulai dari sarana prasarana.
4. kurangnya promosi dan informasi pariwisata secara offline dan Online, baik untuk pengunjung domestic maupun mancanegara.





### Daftar Pustaka

- Adisasmita. Rahardjo, 2010. *Pengolahan pendapatan dan anggaran daerah*, makasar : Graha Ilmu.
- Antariksa, Basuki.(2011). *Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*. Makalah.
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, ( Yogyakarta: Kreasi waczana.2007).
- Bram, Made I. 2006. Tesis: *Studi Tentang Kebijakan Pengembangan Parawisata Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2016). *Efektivitas alokasi anggaran Kementerian pariwisata terhadap Kunjungan wisatawan mancanegara Dan wisatawan nusantara*. Kajian Di Bidang Penganggaran
- Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (2011)*. Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dumai
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ( Yogyakarta: ANDI, 2002.)
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Narbuko , Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian* , (jakarta : Bumi Aksara, 2005).
- Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung : ITB.
- Pendit, Nyoman S, 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*.PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Ryan, C. (1991). *Recreational Tourism: A Social Science Perspective*. Routledge.
- Sugioyo, *Metode, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,( Bandung: Alfabeta, 2007).
- Spillane, James J. (1991).*Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta : Medpress
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Suwarjoko, Warpani & Warpani P. Indira. 2007.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjokrowinoto,M.2005. *Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata : Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta.



# **JURNAL AL-HISBAH**

## **Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai**

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau  
Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

---

Yoeti, Oka, A. 2006. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung, Angkasa.

Yoeti, Oka, A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta, Pradaya Pratama.

Wahab, Salah. 2003. Manajemen Kepariwisataaan. Jakarta, Pradnya Paramita.